

ABSTRAK

Dasar diajukannya gugatan Perlawanan perkara *a quo* yang diajukan oleh para ahli waris melalui kuasa hukumnya berawal dari adanya Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan oleh bank Danamon. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang telah memberikan fasilitas kredit tersebut telah terjadi permasalahan hukum yaitu debitur gagal bayar dimana PT. Petro Kencana (perusahaan fiktif) serta salah satu ahli waris yang menjaminkan Sertifikat No. 175 atas nama alm. O. Sugandi ke bank Danamon, ternyata objek jaminan bukan harta milik pribadi, melainkan harta warisan yang belum dibagi. Dimana objek jaminan tersebut akan dieksekusi oleh pengadilan yang dimohonkan oleh bank Danamon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan yuridis normatif yaitu sumber atau bahan hukum yang akan diambil dari studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif terdapat bahan hukum sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, skunder, dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi pustaka dilakukan dengan membaca, mempelajari, mencatat dan dalam penulisan ini menggunakan tiga teori yaitu teori Perjanjian, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum. Adapun hasil penelitian dalam perkara tersebut menjelaskan ahli waris yang keberatan telah mendaftarkan gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan tujuan untuk menunda eksekusi, dimana telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan perlawanan para Pelawan kabur (*Obcsuur Libel*) dan menyatakan para Pelawan tidak benar dan tidak dapat diterima. Dalam kesimpulan bahwa mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan oleh para pihak sudah memenuhi kriteria sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh kantor pusat Bank Danamon. Bahwa ahli waris sudah membuktikan untuk tampil mengajukan gugatan perlawanan dan memiliki legal standing, karena penghadap pengajuan kredit oleh orang yang fiktif maka berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara dimana sahnya suatu perjanjian memuat suatu kausa yang halal karena syarat objektif dalam suatu perjanjian yang telah dilanggar sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum.

ABSTRAK

The basis for filing a lawsuit against the a quo case filed by the heirs through their attorneys originated from the existence of a Seizure Execution Order by the Tangerang District Court which was filed by Bank Danamon. The bank as an institution that collects funds from the public who have provided the credit facility has had legal problems, namely the debtor failed to pay where PT. Petro Kencana (fictitious company) and one of the heirs who guarantee Certificate No. 175 on behalf of Alm. O. Sugandi to Bank Danamon, it turns out that the collateral object is not personal property, but an inheritance that has not been divided. Where the collateral object will be executed by the court requested by Bank Danamon. The research method used in this study is related to normative juridical, namely legal sources or materials that will be taken from library research. In normative legal research there are secondary legal materials consisting of: primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of gathering legal material for this research is literature study which is done by reading, studying, taking notes and in this writing using three theories, namely the theory of Agreement, Legal Certainty and Legal Protection. The results of research in the case explained that the heirs who objected had registered a lawsuit for Resistance to the Tangerang District Court with the aim of delaying the execution, which was decided by the Panel of Judges with a ruling that the Pelawan fled (Obcsuur Libel) and stated that the Pelawan were not right and could not accepted. In conclusion, the credit application mechanism carried out by the parties has met the criteria in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) issued by Bank Danamon's head office. That the heir has proven to appear to file a counterclaim and has legal standing, because the claimant is applying for credit by a fictitious person, then based on Article 1320 paragraph (4) of the Civil Code where the validity of an agreement contains a lawful cause because the objective conditions in an agreement have been violated so that the agreement is null and void.

Keywords: Mortgage, Credit Agreement, Legal Protection.

